

***ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF PAD, GOVERNMENT EXPENDITURE, AND MSES ON HDI IN MIMIKA DISTRICT***

**ANALISIS PENGARUH PAD, PENGELUARAN PEMERINTAH, DAN UMK TERHADAP IPM DI KABUPATEN MIMIKA**

**Petrus Aldoanus Jahang<sup>1</sup>, Febri Yanto Aristho Wenehen<sup>2</sup>, Arniati Tasik Rara<sup>3</sup>, Rulan L Manduapessy<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Prodi Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jembatan Bulan Timika, Papua Alamat: Jln.Hasanudin, Kode Pos 99910

Email: [aldojahang11@gmail.com](mailto:aldojahang11@gmail.com)<sup>1</sup>, [aristhowenehen@gmail.com](mailto:aristhowenehen@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[arniatitasikrara2001@gmail.com](mailto:arniatitasikrara2001@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[ruanmanduapessy01@gmail.com](mailto:ruanmanduapessy01@gmail.com)<sup>4</sup>

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of government expenditure, local revenue, and district minimum wage on the human development index in Mimika Regency. The research method used is associative using multiple linear regression analysis. The data used comes from secondary sources, namely data published by BPS and BAPENDA Mimika Regency for the period 2014 to 2023. The results of this study indicate that government spending has no significant effect on HDI, while local own-source revenue and district minimum wage have a significant effect on the HDI of Mimika Regency.*

**Keywords:** *Government expenditure, Local Revenue, District Minimum Wage, Human Development Index.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh, pengeluaran pemerintah, pendapatan asli daerah, dan upah minimum kabupaten terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Mimika. Metode penelitian yang digunakan adalah asosiatif dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Data yang digunakan berasal dari sumber-sumber sekunder, yaitu data yang di publikasikan oleh BPS dan BAPENDA Kabupaten Mimika periode 2014 sampai 2023. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM, sedangkan pendapatan asli daerah dan upah minimum kabupaten berpengaruh signifikan terhadap IPM Kabupaten Mimika.

**Kata Kunci:** Pengeluaran pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, Upah Minimum Kabupaten, Indeks Pembangunan Manusia,

**PENDAHULUAN**

Kabupaten Mimika, terletak di Provinsi Papua, memiliki kekayaan alam yang melimpah, terutama sumber daya mineral. Hal ini menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika. Dari semua kabupaten yang ada di Provinsi Papua dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat adalah Kabupaten Mimika (BPS Propinsi Papua, 2023). Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika sangat

dipengaruhi oleh beberapa sektor utama, diantaranya adalah sektor pertambangan. Tambang emas yang dijalankan oleh perusahaan besar, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah dan menciptakan banyak lapangan kerja bagi penduduk setempat. Sektor pertanian dan perikanan juga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah, dengan adanya lahan pertanian yang subur dan perairan laut yang kaya akan sumber daya ikan. Dengan mengoptimalkan sinergi antara berbagai sektor tersebut dan memanfaatkan potensi yang ada, Kabupaten Mimika dapat

mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakatnya.

Menurut Sukirno (2016:423) dalam penelitian Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Jeni Palindangan et al. (2021) pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal. Menurut Rapanna dan Zulfikry (2017:6) dalam penelitian Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Jeni Palindangan et al. (2021) pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dimana meningkatnya pendapatan tanpa mengaitkannya dengan tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk umumnya sering dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah fenomena yang sangat penting bagi suatu negara untuk meningkatkan perekonomian, mensejahterakan masyarakat, dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (Kusumawardani & Nuraini, 2020) dalam penelitian Syahidah (n.d.) Pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan suatu negara untuk meningkatkan pembangunan nasional sehingga dapat meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia secara berkelanjutan. Menurut Samuelson,

bahwa setiap negara atau wilayah perlu melihat sektor atau komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor itu memiliki keunggulan komparatif untuk dikembangkan. (Ruslam & Anwar, 2020 dalam Syahidah) Di balik potensi ekonominya yang besar, Kabupaten Mimika masih menghadapi banyak tantangan terutama Indeks Pembangunan Manusia.

Menurut Hukum Okun (Okun's Law) dalam penelitian Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Jeni Palindangan et al. (2021) bahwa melalui peningkatan produktivitas akibat peningkatan IPM akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan peluang dan permintaan tenaga kerja yang dapat menyerap masyarakat dan membantu mengurangi angka pengangguran. Indeks pembangunan manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan manusia terutama pendapatan, kesehatan, pendidikan. Meningkatnya nilai indeks pembangunan manusia menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas pada suatu daerah. Sumber daya manusia merupakan subjek dan objek pembangunan, hal ini mengindikasikan bahwa manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan (Sania et al., 2021)

**Tabel 1: Data Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2023**

TAHUN JUMLAH	
2014	70,40
2015	70,89
2016	71,64
2017	72,42
2018	73,15
2019	74,13
2020	74,19
2021	74,48
2022	75,08
2023	75,91

Sumber: BPS Kabupaten Mimika  
9006

Tabel 1. menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Mimika mengalami peningkatan setiap Tahun. Indeks Pembangunan Manusia terus meningkat namun belum mampu bersaing dengan baik di dunia kerja yang ada di Kabupaten Mimika. Banyak perusahaan yang mengambil tenaga kerja dari luar. Menurut Hukum Okun (Okun's Law) dalam penelitian Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Jeni Palindangan et al. (2021) bahwa melalui peningkatan produktivitas yang disebabkan oleh meningkatnya indeks pembangunan manusia akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan peningkatan permintaan tenaga kerja sehingga banyak masyarakat yang dapat terserap di pasar para pencari kerja yang pada akhirnya dapat menurunkan jumlah pengangguran. Imelda et al. (2021) dalam penelitiannya di Kabupaten Sidarjo mengatakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai alat untuk mengukur keberhasilan suatu pembangunan manusia yang diukur dari komponen dasar kualitas hidup yakni Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, Indeks standar Hidup Layak.

Dari pernyataan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa memang Indeks Pembangunan Manusia sangat berperan penting guna memenuhi standar Dunia kerja. Hal ini juga di dukung dengan penelitian dari Soleha & Fathurrahman (2017) dengan judul Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menyatakan bahwa Untuk menilai kemajuan pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi alat ukur yang krusial dengan IPM tinggi menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Upaya meningkatkan IPM tidak dapat disangkal terkait dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengeluaran Pemerintah, dan Upah Minimum Kabupaten (UPM), yang memainkan peran krusial dalam

membentuk tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pengeluaran pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi penilaian penting untuk mengevaluasi efisiensi kebijakan publik dalam meningkatkan kesejahteraan manusia. IPM, sebagai indikator kemajuan suatu negara, mengukur perbaikan kualitas hidup warganya melalui tiga aspek utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Pengeluaran pemerintah pada sektor-sektor tersebut sangat berdampak pada peningkatan IPM karena langsung memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Secara spesifik, dana yang dialokasikan pemerintah dalam bidang kesehatan memegang peranan penting dalam meningkatkan IPM dengan meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti imunisasi, perawatan prenatal, dan pengobatan penyakit menular.

Investasi pada infrastruktur kesehatan seperti pembangunan rumah sakit dan puskesmas juga berkontribusi pada peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil atau kurang berkembang. Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan juga memiliki dampak signifikan terhadap IPM. Dengan alokasi dana yang memadai, pemerintah dapat meningkatkan akses, kualitas, dan kesetaraan dalam sistem pendidikan. Program seperti beasiswa, bantuan pendidikan, dan peningkatan fasilitas pendidikan dapat membantu meningkatkan partisipasi dan tingkat kelulusan pendidikan, yang pada akhirnya akan memperbaiki kemampuan masyarakat dalam mencapai standar hidup yang lebih baik.

Soleha & Fathurrahman (2017) dalam penelitiannya mengatakan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia, semakin tinggi pengeluaran pemerintah maka akan semakin tinggi juga indeks Pembangunan manusia.

Namun hal itu bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh abu bakar (2020) Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Mimika, dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan. Disebabkan karena adanya disparitas pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan yang cukup besar, jika dibandingkan dengan pengeluaran pada sektor lain. Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan juga masih belum

terfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan tetapi lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Sehingga hal ini kurang memberikan pengaruh secara langsung terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia Kabupaten Mimika.

Selain itu, pendapatan Asli Daerah (PAD) memainkan peran penting dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah. Melalui sumber pendapatan seperti pajak dan retribusi daerah, PAD dapat dialokasikan untuk memperkuat layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sanitasi. Investasi yang cukup dalam pendidikan dan kesehatan berpotensi meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan IPM dengan meningkatkan literasi, keterampilan, dan kesehatan masyarakat. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar yang didanai melalui PAD menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan manusia. Peningkatan pendapatan masyarakat dari sumber PAD juga dapat memperkuat daya beli, yang pada gilirannya meningkatkan akses terhadap layanan-layanan penting dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan mengelola PAD dengan baik dan mengalokasikannya secara efisien, suatu daerah dapat menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan IPM dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Alam & Abu Bakar (2023) Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Mimika, dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Mimika. Artinya, semakin besar PAD yang diperoleh oleh kabupaten Mimika, maka IPM akan mengalami peningkatan yang sejalan.

Pengaruh Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan dinamika yang kompleks dalam hubungan antara ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kenaikan UMK dapat membawa dampak signifikan

pada IPM melalui beberapa jalur. Pertama-tama, kenaikan UMK dapat meningkatkan pendapatan pekerja di Kabupaten Mimika memungkinkan akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang menjadi faktor penting dalam membangun IPM yang lebih baik. Selain itu, peningkatan pendapatan juga dapat mendorong akses yang lebih luas terhadap pendidikan yang lebih tinggi, yang dapat meningkatkan literasi dan kualifikasi tenaga kerja, yang pada gilirannya dapat memperkuat IPM. Di sisi lain, kenaikan UMK juga dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Mimika, yang memiliki dampak positif pada IPM dengan mengurangi hambatan akses terhadap layanan dasar. Namun, perlunya keseimbangan dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi Kabupaten Mimika.

(Herman, 2018) yang berjudul Pengaruh Upah Minimum Kota (UmK) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekanbaru (2009-2016). Menyatakan bahwa pembangunan manusia menjadi isu penting dalam pembangunan ekonomi karena menyangkut kualitas manusia sehingga perlu mendapat perhatian. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Variabel Upah Minimum Kota berpengaruh Signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Pekanbaru.

Dari hasil latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh Pendapatan Asli daerah, Pengeluaran Pemerintah, Dan Upah Minimum Kabupaten terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Mimika.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Asosiatif. Asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, mencari peranan, pengaruh, dan hubungan yang bersifat sebab-akibat, yaitu antara variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent). Alata analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel yang bersifat kuantitatif. Pemilihan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, di antaranya: Kemampuan untuk menguji banyak variabel independen secara simultan: Regresi linear berganda memungkinkan peneliti untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Dalam penelitian ini, terdapat tiga variabel independen (PENGELUARAN PEMERINTAH, PAD, UMK) dan satu variabel

dependen (IPM).

### Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian adalah data Pengeluaran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, Upah Minimum Kabupaten dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mimika. Dengan sampel sebanyak Sepuluh Tahun terakhir yakni, Tahun 2014-2023.

### Data Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data kuantitatif sedangkan, sumber data adalah sumber sekunder, yaitu pihak ke dua yang menyediakan data yakni, BPS dan BAPENDA Kabupaten Mimika.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Yaitu, dengan mengumpulkan dokumentasi data-data yang telah di publikasikan oleh Badan Pusat Statistik dan Bapenda Kabupaten Mimika.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 2: Uji Ketepatan Model Penelitian**

Uji ketepatan model penelitian dapat dilihat dari hasil tabel uji F berikut:

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	302807.996	3	100935.999	206.490	.000 <sup>b</sup>
	Residual	2932.904	6	488.817		
	Total	305740.900	9			

a. Dependent Variable: IPM

b. Predictors: (Constant), UMK, INVESTASI, PAD

Berdasarkan hasil analisis yang di sajikan pada tabel dua, di ketahui nilai signifikansi F 0.00 dimana nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa PENGELUARAN PEMERINTAH, PAD dan UMK secara simultan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Mimika. Hal ini berarti model penelitian yang di

formulasikan pada penelitian ini sudah tepat sehingga layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Adjusted R-squared adalah versi penyesuaian dari R-squared yang memperhitungkan jumlah variabel independen dalam model. Ini membantu menghindari peningkatan artificial R-squared ketika menambahkan variabel independen yang tidak signifikan.

**Tabel 3: Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.995 <sup>a</sup>	.990	.986

Berdasarkan hasil analisis pada tabel tiga terdapat hubungan yang sangat kuat antara Pengeluaran Pemerintah, PAD, UMK dan IPM

di Kabupaten Mimika. Dengan nilai Adjusted R Square sebesar 98,6%, yang artinya 2,4% dipengaruhi oleh variabel lain.

### Pengeluaran pemerintah, PAD Dan UMK Terhadap IPM

Uji pengaruh (Beta) adalah proses untuk menguji signifikansi dari

koefisien regresi (beta) dalam model regresi. Beta merupakan ukuran dari seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi.

**Tabel 4: Uji Pengaruh**

Model				Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	6545.613	39.604		165.275	.000
	PENGELUARAN PEMERINTAH	1.170E-9	.000	.103	2.288	.062
	PAD	5.528E-13	.000	.147	2.340	.058
	UMK	2.169E-6	.000	.909	15.608	.000

Dari hasil analisis yang di sajikan pada tabel empat, bahwa nilai signifikansi pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap IPM sebesar 0,62 lebih besar dari 0,05 dengan demikian dapat di simpulkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan nilai 0,58 lebih besar dari 0,05 dengan demikian tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dan Upah Minimum Kabupaten memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan nilai 0,00 lebih kecil dari 0,05.

#### **Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mimika.**

Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Mimika. Hal ini disebabkan karena peningkatan dalam pengeluaran pemerintah, jika alokasi dana tidak efektif atau tidak tepat sasaran, maka dampaknya terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat terhambat. Jika dana tidak didistribusikan secara merata atau tidak difokuskan pada sektor-sektor kunci seperti kesehatan dan pendidikan, maka dampak terhadap IPM akan terbatas. Efisiensi dalam penggunaan anggaran pemerintah juga merupakan faktor yang signifikan, pemborosan atau penyalahgunaan dana

dapat mengurangi manfaat yang seharusnya diperoleh dari pengeluaran tersebut. Selain itu adanya faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi hubungan antara pengeluaran pemerintah dan IPM juga perlu diperhatikan, seperti kondisi ekonomi nasional atau dampak dari perubahan kebijakan publik. Oleh karena itu, meskipun pengeluaran pemerintah memberikan kontribusi positif terhadap IPM, namun tanpa penanganan terhadap faktor-faktor tersebut, dampaknya tidak signifikan di Kabupaten Mimika.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abu Bakar (2020) Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Mimika, dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan. Disebabkan karena adanya disparitas pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan yang cukup besar, jika dibandingkan dengan pengeluaran pada sektor lain. Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan juga masih belum terfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan tetapi lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan.

#### **Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Mimika.**

Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupten Mimika. Hal ini disebabkan karena distribusi pendapatan yang tidak merata di masyarakat, keterbatasan akses dan infrastruktur pada layanan kesehatan serta pendidikan, dan juga ketidakseimbangan ekonomi dan sosial yang masih tinggi. Akibatnya, meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik, tanpa mengatasi permasalahan tersebut, kenaikan PAD tidak akan berpengaruh terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mimika.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alam & Abu Bakar (2023) Penelitian yang dilakukan di Kabuapeten Mimika, dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Mimika. Artinya, semakin besar PAD yang diperoleh oleh kabupaten Mimika, maka IPM di kabupaten Mimika akan mengalami peningkatan yang sejalan.

### **Upah Minimum Kabupaten Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Mimika**

Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa Upah Minimum Kabupaten (UMK) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mimika. Menunjukkan bahwa semakin tinggi UMK, semakin tinggi pula IPM di Kabupaten Mimika. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan UMK dapat meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong konsumsi, dan meningkatkan IPM secara keseluruhan.

Hubungan antara Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menegaskan pentingnya kebijakan upah yang adil dan layak sebagai faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan manusia di Kabupaten Mimika. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah setempat dan para pemangku kepentingan terkait akan terus memprioritaskan peningkatan UMK sebagai strategi untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat

secara keseluruhan di Kabupaten Mimika.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia Risti Rahyu et al (2022). Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Karawang, dalam penelitiannya menyatakan bahwa Upah minimum Kabupaten berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kerawang.

Penelitian ini sejalan juga dengan Penelitian yang dilakukan oleh Sania et al. (2021) Penelitian yang dilakukan di Kabupaten dan Provinsi di Jawa Timur, dalam penelitiannya menyatakan bahwa Upah Minimum Kabupaten berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Provinsi di Jawa Timur.

### **PENUTUP**

Pengeluaran Pemerintah dan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan tidak memiliki pengaruh terhadap indeks Pembangunan manusia. Hal ini disebabkan karena peningkatan dalam pengeluaran pemerintah, jika alokasi dana tidak efektif atau tidak tepat sasaran, maka dampaknya terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat terhambat. Pendapatan Asli Daerah yang tidak merata di masyarakat, keterbatasan akses dan infrastruktur pada layanan kesehatan serta pendidikan, dan juga ketidakseimbangan ekonomi dan sosial yang masih tinggi. Sedangkan Upah Minimum Kabupaten memiliki pengaruh dalam mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Upah Minimum Kabupaten, semakin tinggi pula Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Mimika.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka saran yang dapat di berikan sebagai berikut: Pemerintah daerah perlu berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan fasilitas di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur guna memberikan pelayanan yang baik untuk Masyarakat. Pemerintah daerah perlu mendorong peningkatan PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah serta memperluas basis pajak dan retribusi daerah. Pemerintah daerah perlu meningkatkan investasi di berbagai sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan IPM di Kabupaten Mimika dapat terus meningkat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Diklat, B., Cimahi, K., Gadobangkong, J. R., & Barat, B. (2020). Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2018 Puji Agus. *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, 1(1), 20–36.
- garuda1709474. (n.d.).
- Gulo, H., Fitrawaty, F., & Arwansyah, A. (2023). Analisis pengaruh dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia di Sumatera Utara. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(1), 59–73. <https://doi.org/10.30738/sosio.v9i1.13725>
- Imelda, R., Balaffif, M., & Wahyuni, S. T. (2021). Pengaruh Pendidikan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Upah Minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo Tahun 1998-2017. *Bharanomics*, 1(2), 67–74. <https://doi.org/10.46821/bharanomics.v1i2.155>
- Kaadafi Z, M., Asnidar, & Miswar. (2023). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan IPM di Langsa. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 123–134. <https://doi.org/10.32505/jim.v5i2.6831>
- Nasir, Yuslinaini, A. Hamid, Yusuf, Z., & Zakaria. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Alokasi Anggaran Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Banda Aceh. *Jurnal EMT KITA*, 7(3), 676–683. <https://doi.org/10.35870/emt.v7i3.1199>
- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 212. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1034>
- Pendapatan Daerah Dan Dana Perimbangan, P., Moises Boling, J., & Apriyanto, G. (2023). DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DALAM MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA. In *Journal of Comprehensive Science* (Vol. 2, Issue 1).
- Pengaruh, A., Najmi, I., Abulyatama, U., & Humaniora, J. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia : Panel Data 23 Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh. 3(1), 36–47. [www.jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora](http://www.jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora)
- Pengaruh, A., Pemerintah, P., Pendidikan, S., Kesehatan, S., Pendapatan, D., Pujianti, A. D., Fatimah, S., & Sriningsih, S. (2023). TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (Vol. 2, Issue 2).
- Pengaruh Tingkat Pertumbuhan EkonomiJeni Palindangan, A., Bakar, A., Palindangan, J., & Studi Ekonomi Pembangunan Jambatan Bulan, P. (2021). ANALISIS PENGARUH TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI KABUPATEN MIMIKA. 5.
- Program, A. B., Ekonomi, S., Stie, P., & Bulan, J. (n.d.). ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN MIMIKA (Vol. 4).
- Riani, I. N., & Nelvia Iryani. (2023). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Ekspor, Dan Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Barat. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(2), 195–205. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v5i2.702>



- Sahlan, E., Yusuf, Y., & Susanto, D. (2022). PENGARUH PENDATAAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM). *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, 4(1). <https://doi.org/10.58258/jihad.v4i1.4592>
- Sania, L., Balafif, M., & Imamah, N. (2021). Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka dan UMR Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. *Bharanomics*, 2(1), 33–46. <https://doi.org/10.46821/bharanomics.v2i1.189>
- Soleha, K. G., & Fathurrahman, A. A. (2017). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). In *Journal of Economics Research and Social Sciences* (Vol. 1, Issue 1). *syahidah*. (n.d.).
- Zahira, S. N., Rahyu, A. R., & Fajri, F. N. (2022a). Pengaruh Upah Minimum Regional, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Realisasi Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Karawang Tahun 2011-2020. *Jurnal STEI Ekonomi*, 31(01), 102–111. <https://doi.org/10.36406/jemi.v31i01.517>
- Zahira, S. N., Rahyu, A. R., & Fajri, F. N. (2022b). Pengaruh Upah Minimum Regional, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Realisasi Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Karawang Tahun 2011-2020. *Jurnal STEI Ekonomi*, 31(01), 102–111. <https://doi.org/10.36406/jemi.v31i01.517>